

PJ BUPATI KOLUT UJI COBA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEJUMLAH SD DAN SMP



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/19/IMG-20240919-WA0141.jpg.webp>

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut), Yusmin, menggelar uji coba makanan bergizi gratis di sejumlah SD dan SMP pada akhir September 2024.

Pj Bupati Kolut Yusmin di Kendari, Kamis, mengatakan sebagai langkah awal untuk program uji coba makanan bergizi gratis akan dilakukan di beberapa SD dan SMP.

"Saya programkan dalam minggu ini, bulan ini dan kita uji coba makanan bergizi untuk anak SD dan SMP," katanya.

Yusmin menuturkan Pemkot Kolut saat ini masih memiliki anggaran perubahan yang dialokasikan khusus untuk makan bergizi gratis meskipun dengan kondisi yang terbatas.

"Maka program makan bergizi gratis tidak dilakukan serentak seluruh sekolah, melainkan secara bertahap," katanya. Ia mengatakan sebagai uji coba nantinya akan dipilih beberapa sekolah.

"Penerapannya mungkin tidak tiap hari, mungkin satu minggu dua kali atau satu minggu sekali tergantung dari anggarannya dan berapa jumlah siswa kita yang mendapatkan makanan bergizi gratis," katanya.

Ia menambahkan Kolut harus menjadi daerah di Sultra yang lebih dulu melaksanakan program ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kolut, Muh. Idrus menyampaikan apresiasi atas gagasan yang dicanangkan Pj Bupati Kolut terkait makanan bergizi gratis.

"Ide beliau ini sangat luar biasa. Jadi ini ide yang sangat cemerlang dan merupakan lompatan berpikir yang perlu kami apresiasi dan perlu ditindaklanjuti," ucapnya.

Kata dia, untuk makan bergizi gratis sendiri pihaknya akan melihat data beberapa wilayah yang terdampak stunting.

"Jadi ini karena uji coba tentu lokusnya kita batasi dulu, tetapi intinya ide ini luar biasa dan kami sambut baik dari dinas pendidikan," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470367/pj-bupati-kolut-uji-coba-program-makan-bergizi-gratis-di-sejumlah-sd-dan-smp>, "Pj Bupati Kolut uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah SD dan SMP", tanggal 19 September 2024.
2. <https://sultranesia.com/pj-bupati-kolut-bakal-luncurkan-program-makanan-bergizi-gratis-untuk-sd-smp/>, "Pj Bupati Kolut Bakal Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis untuk SD-SMP", tanggal 19 September 2024.

Catatan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

a. Pasal 1:

- 1) angka (1) yang menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 2) angka (4) yang menyatakan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap Upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

b. Pasal 2 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pemenuhan asupan gizi.

- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- d. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- e. Pasal 6:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.